

## Analysis of community readiness in the process of revitalizing tourism villages: a case study of Sidoharjo Tourism Village, Yogyakarta

### Analisis kesiapan masyarakat dalam proses revitalisasi desa wisata: studi kasus Desa Wisata Sidoharjo, Yogyakarta

Rina Widiastuti\*, Nuryuda Irdana, Bima Adi Gunawan, Mutiara Maulida Purnaningtyas  
Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

---

#### ARTICLE INFO

##### Keywords:

community readiness model; sidoharjo; tourism village

##### Katakunci:

Community Readiness Model; desa wisata; Sidoharjo

##### DOI:

<https://doi.org/10.26905/jpp.v8i2.8993>

##### Corresponding Author:

Rina Widiastuti  
[rina.widi.astuti@ugm.ac.id](mailto:rina.widi.astuti@ugm.ac.id)

#### ABSTRACT

Rural tourism has become an alternative concept trend in rural economic development in Indonesia in the last decade. Tourism in rural areas is a business sector expected to improve the economy of rural communities, one of which is in the Sidoharjo Tourism Village located in Kulon Regency, Yogyakarta Special Region Province. According to data from the Tourism Village Network of the Ministry of Tourism and Creative Economy, Sidoharjo Tourism Village is a tourism village with a developing category because of its diverse attractions. However, initial observations show that Sidoharjo as a tourism village product has not fully fulfilled the elements of developing a tourism village ecosystem with a developing category listed in the 2021 Tourism Village Guidelines. Therefore, the revitalization of the Sidoharjo Tourism Village is significant. For that, we need to analyze the readiness of the tourism village ecosystem to support revitalization with the Community Readiness Model approach. Data collection techniques using semi-structured interviews, observation, and literature study. The study's results revealed that the people of Sidoharjo were in the pre-planning stage. This result shows that the residents of Sidoharjo are not ready to support the revitalization of the Sidoharjo Tourism Village into an advanced tourist village. The analysis results also reveal that the tourism village category developed by the government version does not match the facts at the research location. Sidoharjo Tourism Village has returned to being a tourism village in the pioneer category due to the stagnation in the development of tourism products.

#### HOW TO CITE ITEM

Widiastuti, R., Irdana, N., Gunawan, B., & Purnaningtyas, M. (2023). Analysis of community readiness in the process of revitalizing tourism villages: a case study of Sidoharjo Tourism Village, Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 8(2). doi:<https://doi.org/10.26905/jpp.v8i2.8993>

#### ABSTRAK

Wisata pedesaan telah menjadi tren konsep alternatif dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pariwisata di pedesaan merupakan sektor usaha yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, salah satunya di Desa Wisata Sidoharjo yang terletak di Kabupaten Kulon Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data Jaringan Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Sidoharjo merupakan desa wisata dengan kategori berkembang karena daya tariknya yang beragam. Namun pengamatan awal menunjukkan bahwa Sidoharjo sebagai produk desa wisata belum sepenuhnya memenuhi unsur pengembangan ekosistem desa wisata dengan kategori berkembang yang tercantum dalam Pedoman Desa Wisata 2021. Oleh karena itu, revitalisasi Desa Wisata Sidoharjo menjadi signifikan. Untuk itu perlu dilakukan analisis kesiapan ekosistem desa wisata untuk mendukung revitalisasi dengan pendekatan Model Kesiapan Masyarakat

(*the Community Readiness Model*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Sidoharjo berada pada tahap pra-perencanaan. Hasil ini menunjukkan bahwa warga Sidoharjo belum siap mendukung revitalisasi Desa Wisata Sidoharjo menjadi desa wisata yang maju. Hasil analisis juga mengungkapkan bahwa kategori desa wisata yang dikembangkan versi pemerintah tidak sesuai dengan fakta di lokasi penelitian. Desa Wisata Sidoharjo kembali menjadi desa wisata dalam kategori perintis akibat stagnasi dalam pengembangan produk wisata.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata menjadi strategi alternatif yang dipandang cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya di kawasan pedesaan (Folarin & Adeniyi, 2020; Zhao & Xia, 2020). Pariwisata adalah sektor yang diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat desa (Liu dkk., 2023; Nooripoor dkk., 2021). Pariwisata di Kawasan pedesaan adalah jenis kegiatan pariwisata baru yang muncul pada akhir abad ke-19, dan berkembang pesat setelah “Perang Dunia II” di Eropa. Revolusi industri meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong perkembangan moda transportasi modern seperti kereta api, dan memberikan lebih banyak waktu istirahat (Tang, 2017). Definisi wisata pedesaan telah dikemukakan oleh para peneliti, namun ada empat aspek utama yang menjadi ciri khasnya, yaitu lokasinya yang berada di desa, pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan kebudayaan, pengelolaannya berbasis komunitas, dan pengalaman menikmati bentang alam serta budaya lokal (Rosalina dkk., 2021). Pembangunan desa wisata dalam aspek pembangunan berkelanjutan juga berkaitan dengan pengembangan produk wisata yang melibatkan berbagai sumber daya, baik sumber daya *tangible* dan *intangible*. Pengembangan produk pariwisata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan (Haid & Albrecht, 2021).

Pembangunan desa wisata merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggenjot pengelolaan desa wisata dan menargetkan terwujudnya 244 desa wisata yang tersertifikasi sebagai desa wisata mandiri pada tahun 2024. Desa wisata menjadi salah satu prioritas dalam program pengembangan Kemenparekraf karena mempunyai potensi besar dalam peningkatan pendapatan negara (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021).

Pada tahun 2018, menurut data Badan Pusat Statistik tentang Potensi Desa tahun 2018, ada 1.734 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia (Putra, 2018). Menurut Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata (Asidewi), pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi 1.838 desa wisata (Ramadhian, 2021). Desa wisata mempunyai kategori tingkatan atau level yang berbeda-beda, mulai dari desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Agar dapat berkontribusi bagi peningkatan perekonomian sebuah desa, desa wisata harus mempunyai level maju atau mandiri (Wirdayanti dkk., 2021). Desa wisata pun telah menjadi tren konsep alternatif dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan peran penting pembentukan desa wisata bagi peningkatan perekonomian desa. Penelitian Marlina (Marlina, 2019) mengungkap peran desa wisata terhadap peningkatan keahlian dan kesadaran tentang pariwisata di pedesaan, yang berpengaruh pada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung sehingga menaikkan jumlah Pendapatan Asli Desa Ketenger di Banyumas. Penelitian Suswanta dkk. (Suswanta dkk., 2020) menunjukkan pengaruh signifikan Desa Wisata Kadisoro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan bisnis ikan hias, memberikan kebanggaan bagi masyarakat, dan menyalurkan potensi positif karang taruna Kadisoro. Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Wisata Tista, Desa Wisata Bongan, dan Desa Wisata Penatahan, Kabupaten Tabanan, desa wisata dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pesat (Putra & Ariana, 2021). Penelitian lain yang menguatkan gagasan pemerintah tentang peningkatan perekonomian desa melalui desa wisata adalah penelitian yang dilakukan Zaroh di Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tentang dampak Desa Wisata Pentingsari terhadap ekonomi masyarakat setempat memperlihatkan kontribusi desa wisata dalam hal perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan penduduk, peningkatan infrastruktur desa, dan peningkatan pendapatan daerah (Zaroh, 2022).

Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, geliat pembangunan desa melalui pariwisata juga ditunjukkan dengan terbentuknya 22 desa wisata yang telah mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata tahun 2022 (Agusigit, 2022). Salah satu desa wisata di Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah Desa Wisata Sidoharjo yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh. Daya tarik wisata utama Desa Wisata Sidoharjo adalah

wisata alam berupa Bukit Gunung Kendhil, Bukit Tanggulangsi, Bukit Bonthos, Curug Siluwok, Curug Sidoharjo, dan Watu Tekek. Selain itu terdapat kedai-kedai kopi yang menyajikan racikan kopi khas Sidoharjo dan kerajinan jam tangan kayu.

Menurut data Jejaring Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jadesta, 2023), Desa Wisata Sidoharjo termasuk desa wisata kategori berkembang karena keragaman atraksi wisatanya. Meskipun demikian, hasil observasi awal peneliti pada bulan Februari 2022 memperlihatkan bahwa Sidoharjo sebagai sebuah produk desa wisata belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pembangun ekosistem desa wisata dengan kategori berkembang yang tercantum di dalam Pedoman Desa Wisata tahun 2021. Desa wisata Sidoharjo masih memiliki kelemahan pada unsur amenities, aksesibilitas, sumber daya manusia, dan industri pariwisata. Padahal dampak peningkatan ekonomi desa berbasis wisata hanya bisa dirasakan jika ekosistem desa wisata telah terbentuk dan mapan atau dalam kategori desa wisata maju. Oleh karena itu, upaya mendorong Desa Wisata Sidoharjo menjadi desa wisata maju menjadi sangat penting. Upaya ini pun harus direalisasikan dengan program yang terukur. Untuk mengawalinya, perlu penilaian pada kondisi desa wisata terkini yang melibatkan semua unsur pembentuk ekosistem desa wisata.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kesiapan unsur-unsur pembentuk ekosistem Desa Wisata Sidoharjo terkini secara deskriptif mengacu pada sembilan tahap kesiapan masyarakat dalam pendekatan *the Community Readiness Model*. Selanjutnya, kesiapan unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengevaluasi ulang kategori perkembangan desa wisata. Apakah Desa Wisata Sidoharjo siap melakukan proses revitalisasi menjadi desa wisata maju atau justru sebaliknya, justru kembali pada tahap perintisan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Walaupun demikian objek penelitiannya berbeda, karena objek penelitian ini adalah Desa Wisata Sidoharjo. Desa wisata ini terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo pada bulan Juni – Juli 2022. Desa Sidoharjo berada di area perbukitan Menoreh dengan luas 1.374,46 hektar. Jumlah penduduk Desa Sidoharjo sebanyak 5.205 jiwa yang mayoritas bekerja di bidang pertanian dan perkebunan (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021).

Pengumpulan data memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian terdahulu, yaitu dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan kajian pustaka. Perbedaan terletak pada partisipan penelitian dan pendekatan yang digunakan. Data primer penelitian berupa hasil wawancara yang melibatkan 10 informan kunci dalam pembangunan pariwisata di Kalurahan Sidoharjo. Para informan berasal dari unsur Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Karang Taruna, dan Pengurus Desa Wisata dan Pokdarwis Sidoharjo. Data sekunder penelitian adalah hasil observasi dan hasil kajian dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *the Community Readiness Model* (Model Kesiapan Komunitas).

Berdasarkan pendekatan *the Community Readiness Model*, komunitas pelaku wisata di Desa Wisata Sidoharjo diasumsikan berada pada berbagai tahap kesiapan untuk melaksanakan program revitalisasi desa wisata. Kesiapan ini menjadi faktor utama dalam menentukan apakah program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan didukung oleh anggota komunitas. *The Community Readiness Model* dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian dalam *monitoring* dan evaluasi kondisi komunitas dengan tujuan untuk intervensi eksperimental, serta menyediakan alat praktis untuk membantu komunitas bergerak untuk melakukan perubahan dari internal (Oetting dkk., 2014).

Di dalam pendekatan *the Community Readiness Model*, ada sembilan tahap kesiapan komunitas. Model tersebut mendefinisikan sembilan tahap kesiapan komunitas mulai dari “tidak ada kesadaran” akan masalah hingga “profesionalisme” dalam menanggapi masalah di dalam dan di luar komunitas. Penilaian tahap kesiapan dilakukan dengan menggunakan wawancara informan kunci, dengan pertanyaan pada enam dimensi berbeda yang terkait dengan kesiapan komunitas untuk memobilisasi dalam upaya mengatasi masalah tertentu. Berdasarkan pengalaman bekerja secara langsung dengan komunitas, strategi untuk keberhasilan pelaksanaan telah dikembangkan untuk setiap tahap kesiapan. Setelah komunitas mencapai tahap kesiapan di mana upaya lokal dapat dimulai dan tim komunitas dapat dilatih menggunakan model kesiapan komunitas. Tim-tim ini kemudian dapat mengembangkan upaya spesifik yang sesuai dengan budaya yang menggunakan sumber daya lokal untuk memandu komunitas ke tingkat kesiapan yang lebih maju, yang pada akhirnya mengarah pada keberlanjutan jangka panjang dari upaya komunitas lokal (Oetting dkk., 2014).

Inti dari model ini adalah proses penilaian, yang merupakan metode analisis komunitas yang melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan minimal empat hingga lima informan kunci di setiap komunitas. Informan kunci dipilih dari lembaga mediasi atau kelompok pemangku kepentingan di seluruh masyarakat, dan juga termasuk perwakilan masyarakat pada umumnya. Pertanyaan terbuka yang digunakan dalam penilaian membahas tujuh dimensi berbeda, yang berkaitan dengan kesiapan, meliputi: pengetahuan dasar, upaya yang ada (program, kegiatan, kebijakan,); pengetahuan masyarakat tentang upaya yang dijalankan; kepemimpinan (termasuk pemimpin yang ditunjuk dan anggota masyarakat yang berpengaruh); kondisi kemasyarakatan (sikap yang berlaku di masyarakat tentang masalah tersebut); pengetahuan tentang masalah; dan sumber daya yang berkaitan dengan masalah (Oetting dkk., 2014). Validitas data hasil wawancara diukur berdasarkan frekuensi

dan konsistensi munculnya informasi yang sama, yang didapatkan dari wawancara dengan para informan. Data-data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan dimensi-dimensi kesiapan masyarakat, lalu dikonfirmasi pada sembilan kategori tingkat kesiapan masyarakat dalam *the Community Readiness Model*. Penjelasan tentang sembilan tahap kesiapan masyarakat menurut *the Community Readiness Model* disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Tahap Kesiapan Masyarakat

Tahap	Deskripsi	Target
Tidak ada kesadaran ( <i>No awareness</i> )	Isu umumnya tidak diakui oleh masyarakat atau tokoh sebagai masalah.	Meningkatkan kesadaran masalah.
Menolak ( <i>Denial/resistance</i> )	Setidaknya beberapa anggota masyarakat menyadari bahwa ini adalah masalah, tetapi ada sedikit atau tidak ada pengakuan bahwa itu mungkin masalah lokal.	Tingkatkan kesadaran bahwa ada masalah di komunitas itu.
Kesadaran semu ( <i>Vague awareness</i> )	Sebagian besar merasa bahwa ada masalah lokal, tetapi tidak ada motivasi langsung untuk melakukan sesuatu.	Meningkatkan kesadaran bahwa masyarakat dapat melakukan sesuatu.
Pra-perencanaan ( <i>Pre-planning</i> )	Ada pengakuan yang jelas bahwa sesuatu harus dilakukan, dan bahkan mungkin ada komite. Namun, upaya tersebut tidak terfokus atau mendetail.	Meningkatkan kesadaran dengan ide-ide konkret untuk mengatasi masalah.
Persiapan ( <i>Preparation</i> )	Pemimpin yang aktif mulai membuat perencanaan dengan sungguh-sungguh. Komunitas menawarkan dukungan sederhana dari upaya.	Kumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan dan meningkatkan program.
Inisiasi ( <i>Initiation</i> )	Ada informasi yang cukup untuk mendukung upaya dan pelaksanaan program.	Menyediakan informasi komunitas secara spesifik.
Stabilisasi ( <i>Stabilization</i> )	Kegiatan-kegiatan didukung oleh pengelola atau pemangku kebijakan komunitas. Staf terlatih dan berpengalaman.	Menstabilkan upaya/program
Konfirmasi/perluasan ( <i>Confirmation/expansion</i> )	Upaya (standar) telah dilakukan. Anggota masyarakat merasa nyaman dalam menggunakan layanan dan mendukung perluasan. Data lokal dapat diperoleh secara rutin.	Memperluas dan meningkatkan layanan
Tingkat kepemilikan komunitas yang tinggi ( <i>High level of community ownership</i> )	Ada pengetahuan yang detail dan cangih tentang prevalensi, faktor risiko, dan penyebabnya. SDM sangat terlatih dan evaluasi efektif telah rutin dilaksanakan.	Memelihara momentum dan terus berkembang

Sumber: (Oetting dkk., 2014) (diterjemahkan dan dielaborasi oleh peneliti)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ilmiah terkini menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memiliki efek positif pada pariwisata pedesaan karena meningkatnya wisatawan yang mencari tujuan wisata berisiko rendah di daerah yang jarang penduduk (Seraphin & Dosquet, 2020; Vaishar & Št'astná, 2022). Berbeda dengan hasil kajian tersebut, pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya kunjungan wisatawan ke Sidoharjo. Lemahnya manajemen risiko yang ditandai dengan ketiadaan biaya risiko menyebabkan pengelola atraksi wisata kesulitan menghidupkan kembali kegiatan wisata di Sidoharjo, dan kerjasama antar *stakeholder* yang tidak berjalan sehingga pembangunan pariwisata mengalami stagnasi. Penelitian yang dilakukan Salouw (2021) juga mengungkap pentingnya peran stakeholders dalam pengembangan wisata, sayangnya di beberapa tempat seperti di Banda, sama seperti Sidoharjo, koordinasi belum berjalan dengan baik. Di lain pihak, Desa Wisata Sidoharjo dituntut untuk melakukan revitalisasi agar “naik level” dari desa wisata berkembang menjadi desa wisata maju dalam kegiatan lomba desa wisata yang diadakan hampir setiap tahun oleh pemerintah.

Revitalisasi bukan perkara mudah bagi pengelola Desa Wisata Sidoharjo karena dinamika internal organisasi yang mengakibatkan stagnasi pengembangan desa wisata. Perlu pendalaman terkait hambatan-hambatan yang dihadapi pengelola desa wisata sekaligus menggali gagasan untuk aktivasi kegiatan wisata pasca-pandemi Covid-19. Bagian ini mendeskripsikan aspek-aspek yang mendukung kesiapan masyarakat Sidoharjo dalam proses revitalisasi pembangunan pariwisata berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Daftar pertanyaan disusun ulang berdasarkan pendekatan *the Community Readiness Model*.

## Pengetahuan dasar tentang Desa Wisata Sidoharjo

Hasil wawancara mengungkap bahwa pembentukan Desa Wisata Sidoharjo diinisiasi oleh Budi, Lurah Sidoharjo yang menjabat pada tahun 2010. Proses ini adalah bagian dari upaya untuk mengakses dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Selain itu, pembentukan desa wisata merupakan bentuk tanggapan pemerintah kalurahan terhadap konflik pengelolaan Curug Perawan atau yang dikenal dengan nama Curug Sidoharjo. Konflik tersebut melibatkan Karang Taruna dan pemilik lahan. Keberadaan Desa Wisata Sidoharjo diharapkan mampu mengatasi konflik tersebut karena hak pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada desa wisata. Akibat konflik tersebut, sebagian pelaku wisata memilih untuk mengundurkan diri dari pengelolaan Curug Sidoharjo. Hamid, tokoh pemuda yang sempat mengelola Curug menyebutkan bahwa desa wisata tidak cukup mampu mengatasi konflik sehingga konflik menurun seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan. Berikut penjelasannya:

*“Kalau saya bilang kayak desa wisata atau Pokdarwis itu panas di awal tapi akhirnya tidak tahu bagaimana. Dan saya masuk pun begitu kondisinya. Saya tidak tahu itu kesalahan siapa. Kalau pada masa pembentukan semangatnya tinggi. Sebenarnya kalau dari segi visi misinya kuat karena berasal dari pengelola wisata dan ingin mengembangkan daerah wisatanya masing-masing. Cuma karena kesibukan mereka karena kalau sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain sudah tidak bisa fokus lagi di sini (desa wisata)”*

Sementara itu, seiring menurunnya situasi konflik, atraksi-atraksi wisata berbasis alam lainnya pun semakin bertambah. Pembentukan atraksi wisata baru didukung dengan program-program hibah dari universitas, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal yang patut disayangkan, pengurus desa wisata jarang dilibatkan dalam program-program tersebut. Pada awal tahun 2020, sebelum pandemi Covid-19 melanda, terdapat sembilan atraksi wisata yang menjadi unggulan Desa Wisata Sidoharjo, yaitu: Embung Sidoharjo, Curug Sidoharjo, Curug Siluwok, Watu Tekek, Bukit Gunung Kendhil, Bukit Bonthos, Kedai kopi, dan kerajinan jam tangan kayu (Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, 2019). Pernyataan Hamid ini mewakili tidak jauh berbeda dengan pendapat partisipan penelitian lainnya. Mereka mempunyai cerita yang sama tentang awal mula pembentukan desa wisata di Sidoharjo. Mereka juga menyadari bahwa desa wisata tidak berkembang sesuai dengan harapan karena hanya hidup saat ada program hibah dari pemerintah, LSM atau perguruan tinggi.



Gambar 2. Curug Sidoharjo  
Sumber: Website Dinas Pariwisata Kulon Progo, 2021

Dukungan masyarakat lokal untuk pengembangan pariwisata memang bisa bervariasi berdasarkan bagaimana masyarakat lokal merasakan dampak pariwisata. Jika persepsinya positif maka masyarakat setempat akan mendukung pengembangan pariwisata, sedangkan persepsi negatif mengakibatkan penolakan terhadap pengembangan pariwisata (Pekerşen & Kaplan, 2022). Penjelasan para partisipan penelitian tentang dinamika

Desa Wisata Sidoharjo secara umum menunjukkan pemahaman mereka tentang permasalahan yang melingkupi pengelolaan desa wisata, sekaligus menunjukkan adanya persepsi negatif terhadap keberadaan desa wisata.

### **Program Pencegahan dan Pengetahuan Komunitas tentang Upaya Pencegahan**

Seluruh narasumber dalam wawancara sepakat bahwa masalah yang sedang dihadapi Desa Wisata Sidoharjo saat ini adalah masalah sumber daya manusia. Permasalahan tersebut berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang mendukung revitalisasi desa wisata, kesadaran dan pengetahuan tentang model revitalisasi desa wisata, dan kebijakan pemimpin lokal yang belum mendukung pembangunan pariwisata. Mereka mengetahui ketiga masalah tersebut menjadi penghambat pengembangan desa wisata, namun tidak mengetahui cara yang tepat untuk mengatasinya. Upaya perbaikan telah dilakukan oleh pengurus Desa Wisata dan Pokdarwis Sidoharjo, seperti menggagas pengelolaan wisata terintegrasi dan mengusulkan alokasi dana desa untuk pengembangan desa wisata, namun tidak mendapatkan tanggapan, baik dari pengelola atraksi maupun pemerintah Kalurahan Sidoharjo. Hal ini menyebabkan munculnya sikap apatis pengelola desa wisata dan Pokdarwis Sidoharjo dalam revitalisasi desa wisata pasca-pandemi Covid-19. Padahal praktik dan strategi manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk keberlanjutan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan adalah pola pengembangan dan kegiatan sumber daya manusia yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi dan reproduksi basis sumber daya manusia dan mengendalikan dampak negatif jangka panjang. Dalam hal ini, pemerintah setempat tidak bisa membiarkan permasalahan sumber daya manusia terus terjadi di desa wisata. Pemerintah berkewajiban menyediakan sumber daya awal yang dibutuhkan masyarakat, yaitu peluang untuk membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang mendukung ekosistem bisnis desa wisata (Miles & Morrison, 2020). Kepemimpinan transformasional merupakan sumber utama penciptaan nilai sosial, modal sosial dan kreativitas dalam konteks pariwisata pedesaan (Naderi dkk., 2019).

### **Kepemimpinan**

Lurah Umari, sebagai pemegang kebijakan di Sidoharjo, memegang prinsip harmonisasi kehidupan masyarakat. Pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dengan memanfaatkan dana desa masih menjadi misi Lurah Sidoharjo. Lurah menyadari bahwa pariwisata adalah sektor yang penting tetapi belum menjadi prioritas pembangunan. Lurah menyampaikan bahwa:

*“Sebenarnya kalau kita mau tegas agak susah karena mempertimbangkan 18 padukuhan, memang harus ada keseragaman. Itu termasuk program-program juga. Programnya kita harus adil. Biasanya dari 18 padukuhan kalau, misalnya Embung diberi berapa ratus juta, ada beberapa padukuhan yang kurang berkenan.”*

Di sisi lain, para pelaku wisata menilai, pembangunan infrastruktur fisik di Sidoharjo sudah cukup baik sehingga dana desa bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui sektor pariwisata. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, para pelaku wisata pun menganggap sikap Lurah yang tidak memprioritaskan sektor pariwisata, contohnya dalam hal alokasi dana desa, menjadi salah satu hambatan bagi revitalisasi desa wisata.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks pariwisata pedesaan, para pemimpin lokal menghadapi banyak tantangan, seperti mengelola faksi dan kantong dalam komunitas, meyakinkan pendatang baru tentang risiko dan kerentanan, mengamankan komitmen jangka panjang di antara para pemimpin yang bekerja di bawahnya, membangun kesinambungan dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya, dan mengoordinasikan tata kelola kooperatif di dalam pemerintahan dan organisasi non-pemerintah. Ini bukan hal yang mudah karena pemimpin lokal harus mampu membentuk ekosistem bisnis wisata pedesaan dengan metode pendekatan terhadap masyarakat yang tepat (Miles & Morrison, 2020). Oleh karena itu, Lurah Sidoharjo perlu melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter pengelola wisata dalam upaya menginisiasi program revitalisasi desa wisata.

### **Kondisi Masyarakat**

Sidoharjo merupakan wilayah administratif baru yang dibentuk dari tiga kelurahan, yaitu Kalurahan Madigondo, Kalurahan Sulur, dan Kalurahan Gorolangu. Meskipun ketiga kalurahan telah bergabung dalam satu wilayah administratif, semangat kedaerahan masih mengakar kuat di masyarakat. Hal ini menyebabkan konflik horizontal yang sering terjadi pada masa pemilihan Lurah dan terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan pembangunan pariwisata tidak bisa dijalankan oleh pengelola desa wisata. Sinergitas antarpengelola atraksi di beberapa padukuhan sulit diwujudkan. Masyarakat yang terkotak-kotak karena latar belakang kedaerahan yang berbeda seolah didukung dengan kebijakan Lurah yang “menuruti” keinginan setiap kelompok kepentingan demi harmonisasi kehidupan masyarakat dan stabilitas kepemimpinannya. Hal ini disinyalir menjadi penyebab sulitnya menyatukan visi dan misi pembangunan pariwisata antarpengelola atraksi wisata di Sidoharjo. Hal ini bertolak belakang dengan gagasan pentingnya pemimpin lokal yang berpengetahuan, antusias, energik, dan termotivasi sangat penting

untuk pengembangan pariwisata pedesaan yang berkelanjutan. Pemimpin lokal selayaknya terlibat dalam sejumlah kegiatan tata kelola desa wisata, termasuk membentuk ekosistem bisnis pariwisata pedesaan yang infrastruktur sosial kewirausahaan, kebutuhan untuk memanfaatkan jaringan dan platform virtual untuk mengakses pasar, pengetahuan, dan pendanaan, kebutuhan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Miles & Morrison, 2020).

### **Sumber Daya dalam Penyelesaian Masalah**

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kesadaran untuk mendukung revitalisasi desa wisata menyebabkan proses revitalisasi sulit dilakukan. Tanto, Carik Sidoharjo, menjelaskan bahwa:

*“Saya katakan (SDM) siap karena selama ini juga ada kegiatan, kemudian wisata juga masih ada. Tapi saya bilang tidak siap karena dana yang digelontorkan baik CSR, pemerintah pusat dan daerah sudah banyak kok sampai saat ini tidak ada pengunjung. Lha kan tidak siap. Seperti Watutekek itu luar biasa. Mereka ada 5 atau 10 orang mengorbankan tenaga kemudian tanahnya dikasih dan mengeluarkan modal untuk membangun, tapi jalan sudah dibangun bahkan sudah ada dana bantuan tapi begitu-begitu saja. Kalau siap atau tidak siap, kesiapannya hanya 30%.”*

Beberapa pelaku wisata juga telah beralih pekerjaan karena kehilangan penghasilan dari sektor wisata pada masa pandemi Covid-19. Semangat revitalisasi desa wisata hanya dimiliki oleh sebagian kecil pengurus desa wisata dan Pokdarwis di Sidoharjo. Kalaupun ada pengelola atraksi wisata Sidoharjo yang melakukan aktivasi kegiatan wisata, ini dilakukan secara individu dan tidak melibatkan pengurus desa wisata. Akibatnya, ide tentang revitalisasi desa wisata secara terintegrasi yang digagas oleh desa wisata, hanya berhenti pada tataran diskusi. Kurangnya dukungan dari pemimpin lokal dan masyarakat setempat, termasuk pengelola atraksi wisata di Sidoharjo, lambat laun melemahkan semangat pengurus desa wisata dan Pokdarwis dalam proses revitalisasi.

### **Program atau Kebijakan**

Kebijakan tiket bersama yang berlaku bagi seluruh atraksi wisata di Sidoharjo pernah diusulkan oleh pengurus desa wisata. Selain itu, pengurus desa wisata juga mengajukan ide tentang promosi dan pemasaran bersama antarpengelola atraksi wisata. Roji, ketua desa wisata, mengungkapkan bahwa:

*“Obyek wisata di Sidoharjo letaknya agak jauh sehingga ketika itu masuk ke desa wisata, seharusnya desa wisata merangkul. Cuma saat ini masih susah karena saat saya dilantik atau dikukuhkan menjadi desa wisata, saya pernah mengusulkan 8 destinasi wisata, itu sudah saya komunikasikan, bagaimana kalau ticketing itu satu pintu. Nah satu pintu itu, pemahaman teman-teman pengelola ini ketika orang datang ke Sidoharjo, membeli tiketnya harus ke desa wisata jadi belum paham. Jadi misalnya ke Gunung Kendhil bayar Rp10.000, nanti di obyek lain, di Embung misalnya, di Curug Sidoharjo, ketika pengunjung masih bisa menunjukkan tiket masuk tidak usah membayar tiket lagi, cuma parkir. Jadi kita kerja sama dengan BUMDes, biar yang mengatur BUMDes. Jadi tiket masuk itu yang terbanyak di mana, tentunya ada perhitungan tersendiri untuk bagi hasilnya. Tapi saat ini tidak terealisasi.”*

Dari pihak eksternal Sidoharjo pun telah memberikan bantuan dana hibah dan program pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata yang bernilai miliaran rupiah, namun dalam pelaksanaannya tidak berkelanjutan. Berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan beberapa universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diikuti oleh sebagian pengurus desa wisata dan Pokdarwis, serta melibatkan para pengelola atraksi wisata. Walaupun demikian, geliat revitalisasi desa wisata belum juga terlihat. Di sinilah pentingnya kehadiran pemerintah Sidoharjo untuk mengkoordinasikan *stakeholders* internal dan eksternal agar program-program pengembangan desa wisata bisa memberikan dampak yang signifikan. Pola interaksi yang kompleks antar*stakeholders* dalam proses pengembangan desa wisata menyiratkan kebutuhan akan inisiatif pemimpin lokal untuk memeriksa dan memahami interaksi antara kegiatan pariwisata dan kegiatan masyarakat lainnya secara lebih rinci dan membuka peluang untuk menciptakan, mengawasi, mengevaluasi tata kelola desa wisata secara berkelanjutan (Miles & Morrison, 2020).

### **Tinjauan terhadap Tahap Kesiapan Masyarakat dan Klasifikasi Desa Wisata**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses aktivasi pembangunan pariwisata, masyarakat Sidoharjo berada pada tahap pre-planning (pra-perencanaan). Menurut sembilan tahap kesiapan masyarakat dalam *The Community Readiness Model*, munculnya pengakuan yang jelas dalam jawaban atas pertanyaan wawancara bahwa ada masalah mendasar yang harus diselesaikan di Desa Wisata Sidoharjo dan perlunya melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun belum ada upaya tersebut yang

terfokus atau mendetail, menunjukkan tingkat kesiapan masyarakat pada tahap pra-perencanaan (Oetting dkk., 2014).

Dalam konteks Desa Wisata Sidoharjo, tahap kesiapan ini dapat diketahui dari pernyataan-pernyataan yang jelas dari partisipan penelitian bahwa ada masalah lokal berupa kepemimpinan dan sumber daya manusia. Mereka juga menyepakati bahwa revitalisasi perlu dilakukan untuk mengatasinya, tetapi tidak ada perencanaan tindakan nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Ada pemimpin dan kelompok pengelola desa wisata yang diidentifikasi mampu menjalankan revitalisasi, namun upayanya tidak terfokus atau terperinci. Beragam diskusi dan penelitian dari internal maupun eksternal Desa Wisata Sidoharjo telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sektor pariwisata di Sidoharjo, bahkan masyarakat mulai mengakui perlunya menangani masalah tersebut sehingga kepentingan revitalisasi tidak hanya menjadi focus pemimpin lokal atau kelompok-kelompok pengelola pariwisata di des aini.

Selanjutnya, peninjauan ulang tahap kesiapan masyarakat Sidoharjo dan relevansinya dengan klasifikasi desa wisata berkembang, menunjukkan bahwa Desa Wisata Sidoharjo justru kembali masuk dalam klasifikasi desa wisata rintisan (Wirdayanti dkk., 2021) dengan kriteria berikut ini:

- a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata.
- b. Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas.
- c. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh.
- e. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).
- f. Memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata.
- g. Pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pandemi Covid-19 bukanlah penyebab utama penurunan klasifikasi Desa Wisata Sidoharjo. Faktor kepemimpinan dan SDM menjadi penyebab utama stagnasi pengelolaan wisata di Kalurahan Sidoharjo.

Berdasarkan *Community Readiness Strategies*, (Oetting dkk., 2014) menyatakan strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat Sidoharjo dalam proses revitalisasi desa wisata di antaranya:

- a. Sosialisasi tentang masalah ini melalui diskusi, presentasi, dan media pada tingkat lokal.
- b. Mengunjungi dan mengembangkan dukungan dari tokoh masyarakat dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi pengelola desa wisata.
- c. Perlu meninjau upaya yang ada di masyarakat untuk menentukan siapa yang diuntungkan, siapa yang akan terlibat, dan potensi keberhasilannya.
- d. Melakukan pendekatan dan diskusi dengan kelompok-kelompok lokal yang potensial terlibat untuk membahas masalah dan mengembangkan strategi.
- e. Meningkatkan paparan media digital atau konvensional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Sidoharjo.

Penerapan strategi ini tidak bisa lepas dari pentingnya motivasi dan inisiatif Lurah Sidoharjo untuk membangun pariwisata melalui revitalisasi Desa Wisata Sidoharjo sebagai pengelola sektor pariwisata di wilayah ini.

## KESIMPULAN

Hasil analisis kesiapan Kalurahan Sidoharjo dalam proses revitalisasi desa wisata dengan pendekatan *the Community Readiness Model* menunjukkan bahwa komunitas berada pada tahap *pre-planning* (pra-perencanaan). Pelaku wisata di Sidoharjo mengakui bahwa ada masalah sumber daya manusia dalam proses pembangunan desa wisata. Meskipun mereka mengetahui ada masalah sumber daya manusia, namun tidak ada upaya yang detail dan spesifik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sidoharjo belum siap untuk mendukung revitalisasi Desa Wisata Sidoharjo pascapandemi Covid-19. Hasil analisis juga mengungkap bahwa kategori desa wisata berkembang versi pemerintah tidak sesuai dengan fakta di lokasi penelitian. Desa Wisata Sidoharjo justru kembali menjadi desa wisata rintisan karena berhentinya proses pengembangan atraksi wisata, promosi, dan penjualan produk wisata. Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang mengelola desa wisata hanya aktif pada kegiatan-kegiatan pelatihan atau penilaian dari pemerintah. Persoalan kepemimpinan lokal yang tidak mendukung proses pembangunan pariwisata menyebabkan stagnasi perkembangan pariwisata di Sidoharjo. Selain itu SDM pariwisata belum bisa berinovasi dalam pengembangan produk wisata sehingga hanya mengandalkan atraksi wisata alam, yang sebelumnya sempat menyulut konflik antarpelaku wisata.

Sesuai dengan target program yang merujuk pada tingkat kesiapan masyarakat di tahap pra-perencanaan, yang sesuai pendekatan *the Community Readiness Model*, maka perlu program yang mampu meningkatkan kesadaran dengan ide-ide konkret untuk mengatasi masalah di Desa Wisata Sidoharjo. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa persoalan kepemimpinan dan SDM adalah kendala utama revitalisasi Desa Wisata Sidoharjo sehingga program perbaikan yang bisa dilakukan adalah program yang sesuai dengan kebutuhan perbaikan kualitas SDM, baik secara individu maupun secara kelompok. Telah disebutkan strategi peningkatan kesiapan

masyarakat berdasarkan *Community Readiness Startegies* pada tahap pra -perencanaan, namun demikian berikut ini adalah rekomendasi kegiatan teknis yang penting untuk dicoba sebagai sarana penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu: (1) Kegiatan *capacity-building* untuk membentuk kesatuan paradigma pembangunan desa wisata berbasis konsep pariwisata berkelanjutan sebagai sebuah *complex-adaptive system*. Program ini bisa diwujudkan dalam diskusi-diskusi kultural dengan suasana yang santai, yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan, menyesuaikan dengan budaya setempat dan melibatkan tokoh-tokoh kunci yang mampu mempengaruhi kebijakan masyarakat Sidoharjo dan (2) Pengembangan *event-based rural tourism* sebagai bentuk aktivitas wisata pasca-pandemi Covid-19 untuk membangun *teamwork* bagi pelaku wisata di Kalurahan Sidoharjo. Konsep ini bisa menyajikan keunikan Sidoharjo yang tidak dimiliki desa wisata lain, misalnya melalui penyelenggaraan Festival Kopi Menoreh atau Menoreh Mountain Bike Events. Kedua rekomendasi kegiatan ini dapat menyajikan potensi unggulan Sidoharjo, yaitu Kopi Menoreh, dan menyuguhkan kekayaan bentang alam khas Perbukitan Menoreh. Pelaksanaan *event-based rural tourism* juga menjadi ajang untuk membangun *teamwork* antarpelaku wisata di Sidoharjo dan *stakeholders* terkait.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Pengelola Desa Wisata Sidoharjo, Pengurus Pokdarwis Sidoharjo, dan para pelaku wisata yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang telah mendukung penelitian ini dengan memberikan dana hibah penelitian pada tahun 2022.

### DAFTAR RUJUKAN

- Agusigit. (2022, September 24). *Dispar Kulonprogo Gelar Anugerah Desa Wisata*. krjogja.com. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/473504/dispar-kulonprogo-gelar-anugerah-desa-wisata>
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (2021). *Kependudukan DIY*. Pemerintah Provinsi DIY. <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/jumlahpenduduk/16/0/11/01/34.clear>
- Folarin, O., & Adeniyi, O. (2020). Does Tourism Reduce Poverty in Sub-Saharan African Countries? *Journal of Travel Research*, 59(1), 140–155. <https://doi.org/10.1177/0047287518821736>
- Haid, M., & Albrecht, J. N. (2021). Sustainable tourism product development: An application of product design concepts. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/su13147957>
- Jadesta. (2023). *Pencarian: Sidoharjo di Desa Wisata*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <https://jadesta.kememparekraf.go.id/search?type=7&submit=1>
- Kememparekraf/Baparekraf RI. (2021, April 27). *Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . <https://kememparekraf.go.id/ragam-pariwisata/membangun-ekosistem-desa-wisata-bersama-komunitas>
- Liu, Y. L., Chiang, J. Te, & Ko, P. F. (2023). The benefits of tourism for rural community development. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01610-4>
- Marlina, N. (2019). Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: Studi kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4735>
- Miles, M. P., & Morrison, M. (2020). An effectual leadership perspective for developing rural entrepreneurial ecosystems. *Small Business Economics*, 54(4), 933–949. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0128-z>
- Naderi, A., Nasrolahi Vosta, L., Ebrahimi, A., & Jalilvand, M. R. (2019). The contributions of social entrepreneurship and transformational leadership to performance: Insights from rural tourism in Iran. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 39(9–10), 719–737. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-06-2019-0124>
- Nooripoor, M., Khosrowjerdi, M., Rastegari, H., Sharifi, Z., & Bijani, M. (2021). The role of tourism in rural development: Evidence from Iran. *GeoJournal*, 86(4), 1705–1719. <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10153-z>

- Oetting, E. R., Plested, B. A., Edwards, R. W., Thurman, P. J., Kelly, K. J., & Beauvais, F. (2014). *Community Readiness for Community Change* (L. R. Stanley, Ed.; 2 ed.). Tri-Ethnic Center for Prevention Research Sage Hall, Colorado State University.
- Pekerşen, Y., & Kaplan, M. (2022). The perceptions of a local community on tourism development: The case of Akyaka as a Cittaslow. *Community Development*. <https://doi.org/10.1080/15575330.2022.2071956>
- Putra, A. M., & Ariana, I. N. J. (2021). Manfaat pengembangan desa wisata dari aspek alam, sosial budaya, spiritual, dan ekonomi di kabupaten tabanan. *Jurnal Kepariwisata dan Hospitalitas*, 5(2), 209–221.
- Putra, D. A. (2018, Desember 10). *Data BPS: Indonesia Miliki 1.734 Desa Wisata*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/uang/data-bps-indonesia-miliki-1734-desa-wisata.html>
- Ramadhian, N. (2021, Agustus 1). *Berapa Jumlah Desa Wisata di Indonesia?* . Kompas.com. <https://travel.kompas.com/read/2021/08/01/180600927/berapa-jumlah-desa-wisata-di-indonesia-?page=all>
- Rosalina, P. D., Dupre, K., & Wang, Y. (2021). Rural tourism: A systematic literature review on definitions and challenges. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47, 134–149. <https://doi.org/10.1016/J.JHTM.2021.03.001>
- Salouw, E. (2021). IMPLEMENTASI PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA (Studi Kasus pada Kepulauan Banda). *JURNAL PARIWISATA PESONA*, 6(1), 81–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5543>
- Seraphin, H., & Dosquet, F. (2020). Mountain tourism and second home tourism as post COVID-19 lockdown placebo? *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 12(4), 485–500. <https://doi.org/10.1108/WHATT-05-2020-0027>
- Suswanta, Atmojo, M. E., & Sakir. (2020). Pengembangan Desa Wisata Edukatif Berbasis Budidaya Ikan Hias di Dusun Kadisoro, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *JCommdev-Journal of Community Development & Empowerment*, 1(1), 52–58.
- Tang, L. (2017). The Overview of the Origin and Research of Rural Tourism Development. *Advances in Intelligent Systems Research*.
- Vaishar, A., & Šťastná, M. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on rural tourism in Czechia Preliminary considerations. Dalam *Current Issues in Tourism* (Vol. 25, Nomor 2). <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1839027>
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., Esti S., H., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar Monalisa, Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). *Pedoman Desa Wisata* (A. Wirdayanti & V. Ariani, Ed.; 2 ed.). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia).
- Zaroh, E. C. (2022). Dampak Desa Wisata Pentingsari Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat di Dusun Pentingsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 28–34.
- Zhao, L., & Xia, X. (2020). Tourism and poverty reduction: Empirical evidence from China. *Tourism Economics*, 26(2), 233–256. <https://doi.org/10.1177/1354816619863266>